

**“DEMO MAHASISWA SUDAH KELEWAT BATAS”:
PENGARUH PEMBERITAAN MEDIA DAN PERSEPSI PUBLIK
TERHADAP KETAHANAN SOSIAL-BUDAYA DI KOTA
MAKASSAR**

Mochammad Nurdi Iriansyah

Fakultas Psikologi, Universitas Jenderal Ahmad Yani, Cimahi, Indonesia.
Email Korespondensi: nurdi2007@gmail.com

Submitted: 05-02-2025; Accepted: 03-03-2025; Published : 08-03-2025

ABSTRAK

Sulawesi Selatan menjadi daerah dengan jumlah demonstrasi terbanyak di Indonesia pada tahun 2024, yang sebagian besar di antaranya merupakan gerakan mahasiswa di Kota Makassar. Kendati hal itu dapat dilihat sebagai sikap kritis dan ekspresi kebebasan mahasiswa, aksi unjuk rasa tersebut sering kali diwarnai perilaku-perilaku agresif dan kontra-normatif, membuat banyak anggota masyarakat menentang gerakan mahasiswa alih-alih mendukungnya. Penelitian ini menerapkan teori *agenda-setting* untuk menyelidiki bagaimana liputan media dan persepsi publik terkait perilaku agresif mahasiswa selama berunjuk rasa berdampak pada ketahanan sosial-budaya di Kota Makassar. Dengan menggunakan desain metode campuran, yaitu survei kuantitatif ($n=200$) serta wawancara ($n=30$) dan observasi kualitatif, penelitian ini menemukan bahwa liputan media memiliki pengaruh yang lebih kuat terhadap ketahanan sosial-budaya masyarakat daripada persepsi publik. Analisis regresi linier menunjukkan bahwa liputan media menjelaskan 33,8% dari variasi ketahanan sosial-budaya, sedangkan persepsi publik hanya 2,1%. Ketika kedua variabel tersebut dipertimbangkan secara bersama-sama dengan menggunakan analisis regresi linier berganda, efek gabungan keduanya menjelaskan 37,2% dari variasi ketahanan sosial-budaya. Sejalan dengan teori *agenda-setting*, temuan ini mengindikasikan bahwa media bukan hanya mengarahkan perhatian publik secara tidak proporsional kepada aspek konfrontasi dan konflik (misalnya, kerusuhan alih-alih motif protes), tetapi juga membentuk interpretasi masyarakat terhadap peristiwa-peristiwa tersebut. Pembingkaiannya seperti itu berisiko melemahkan ketahanan sosial-budaya di Kota Makassar dengan memicu kepanikan massa, ketidakpercayaan terhadap aparat keamanan dan institusi sosial-politik yang ada, pembelahan sosial, dan normalisasi aksi-aksi kontra-normatif dalam gerakan sosial di masa mendatang.

Kata kunci: Pemberitaan Media, Persepsi Publik, Gerakan Mahasiswa, Ketahanan Sosial-Budaya.

ABSTRACT

South Sulawesi has the highest number of demonstrations in Indonesia in 2024, most of which are student movements in Makassar City. While they can be seen as a critical stance and expression of student freedom, the protests are often characterized by aggressive and counter-normative behaviors, leading many members of the public to oppose the student movement instead of supporting it. This study applies agenda-setting theory to investigate how media coverage and public perceptions of aggressive student behavior during protests impact socio-cultural resilience in Makassar City. Using a mixed-methods design, namely a quantitative survey ($n=200$) as well as interviews ($n=30$) and qualitative observations, this study found that media coverage has a stronger influence on community socio-cultural resilience than public perception. Linear regression analysis showed that media coverage explained 33.8% of the variation in socio-cultural resilience, while public perception only 2.1%. When the two variables were considered together using multiple linear regression analysis, their combined effect explained 37.2% of the variation in socio-cultural

resilience. In line with agenda-setting theory, these findings indicate that the media not only disproportionately direct public attention to aspects of confrontation and conflict (e.g., riots instead of protest motives), but also shape people's interpretations of these events. Such framing risks weakening socio-cultural resilience in Makassar City by triggering mass panic, distrust of security forces and existing socio-political institutions, social division, and normalization of counter-normative actions in future social movements.

Key word: *Media Coverage, Public Perception, Student Movement, Socio-Cultural Resilience.*

PENDAHULUAN

Pada tahun 2024, Sulawesi Selatan menjadi daerah dengan aksi unjuk rasa terbanyak di Indonesia (mencapai 800 aksi), yang sebagian besar di antaranya terjadi di Kota Makassar (Wahyudi, 2024). Hal ini mungkin merefleksikan nilai-nilai kekerabatan yang tertanam dalam kebudayaan penduduk asli. Sebagaimana dicatat oleh Widiensyah dan Hamsah (2018), suku-suku asli Makassar memiliki rasa senasib dan sepenanggungan yang tinggi sehingga saling membantu satu sama lain dalam kondisi sulit. Dalam pengertian ini, protes—terutama yang digerakkan oleh mahasiswa—mengekspresikan nilai-nilai kekerabatan tersebut. Mahasiswa melihat diri mereka sebagai bagian dari masyarakat yang sedang dirugikan oleh sistem saat ini, dan mereka merasa bertanggung jawab untuk menyampaikan keluhan dan aspirasi itu—tidak hanya sebagai mahasiswa tetapi juga sebagai warga negara (Proust & Saldaña, 2022). Mereka biasanya menghindari “musyawarah rasional” atau “jalur hukum” apa pun. Mereka meyakini bahwa penguasa yang mereka keluhkan tidak memiliki motif murni untuk duduk bersama mereka, selain menggunakan kekuasaannya secara tidak adil untuk mengarahkan jalannya diskusi (Young, 2001). Dengan keyakinan seperti ini, berdemonstrasi di jalanan dianggap sebagai pilihan yang paling masuk akal.

Masalahnya, aksi unjuk rasa yang dilatarbelakangi oleh niat mulia tersebut pada prosesnya tidak jarang diwarnai konflik dan konfrontasi. Sebagaimana dicatat oleh Jubba (2012, hlm. 55), “[G]erakan mahasiswa Makassar umumnya bersifat militan dan puritan.” Mereka kerap terlibat dalam perilaku protes yang destruktif dan kontra-normatif seperti penggunaan retorika yang menghasut, pemblokiran lalu lintas, perusakan infrastruktur, menduduki dan merebut ruang-ruang publik, dan

mengganggu aktivitas sehari-hari warga lainnya. Pada akhir Maret 2012 lalu, misalnya, mahasiswa berunjuk rasa untuk menentang kebijakan pemerintah yang menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM). Protes ini diwarnai berbagai macam perilaku ekstrem seperti membakar ban di beberapa poros jalan raya, membakar keranda berisi foto Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), melempar batu ke arah aparat, menyandera truk kontainer, menjarah sebuah restoran cepat saji asal Amerika Serikat, dan membakar sebuah mobil boks milik PT. CocaCola (Cipto, 2012b). Sekitar dua tahun sebelumnya, dengan motif yang sama, mahasiswa di Jalan Urip Sumoharjo Makassar membakar ban dan menggunakan bambu untuk menghalangi pengguna jalan yang melintas, serta aksi *sweeping* terhadap mobil plat merah karena dianggap sebagai kroni Presiden SBY (Marijan & Fitrianto, 2013). Pada awal September 2022, masih untuk menolak kenaikan harga BBM tetapi di rezim yang berbeda, mahasiswa terlibat bentrokan dengan warga sekitar karena mahasiswa dianggap mengganggu aktivitas warga dengan memblokir jalan Trans Sulsel (Cipto & Rusiana, 2022).

Kerusuhan dan kekerasan yang terjadi selama aksi unjuk rasa dapat disebabkan oleh aneka faktor, baik tunggal maupun tumpang tindih, tetapi secara eksternal hal itu sering kali dipengaruhi oleh pemberitaan media. Salah satu tujuan utama demonstrasi adalah untuk menarik perhatian luas terhadap apa yang dianggap sebagai ketidakadilan dan kekuasaan yang disalahgunakan (Proust & Saldaña, 2022). Guna memenuhi tujuan ini, para aktivis mahasiswa mencari publisitas melalui media. Bagaimana cara agar sebuah gerakan sosial mendapatkan publisitas yang tinggi? Penelitian menemukan bahwa media biasanya meliput peristiwa terbaru, dramatis, dan sensasional (Feinberg dkk., 2017; Ruigrok dkk., 2017). Marijan dan Fitrianto

“Demo Mahasiswa Sudah Kelewat Batas”: Pengaruh Pemberitaan Media Dan Persepsi Publik Terhadap Ketahanan Sosial-Budaya Di Kota Makassar (Mochammad Nurdi Iriansyah)

(2013) mencatat bahwa salah prinsip utama media adalah “*bad news is a good news*”. Maksudnya, apa yang menurut masyarakat merupakan berita buruk, bagi media, hal itu merupakan sesuatu yang bagus untuk diberitakan. Para aktivis mahasiswa tampaknya memahami prinsip tersebut, di mana aksi-aksi ekstrem dan dramatis dilakukan untuk mengundang perhatian jurnalis dan wartawan. Bahkan ada sejenis ungkapan di antara mereka, “Tunggu dulu wartawan datang, baru kita bakar ban.” Hal ini membuat pemberitaan tentang demonstrasi mahasiswa lebih berfokus pada kekerasan dan kerusakan yang ada di dalamnya dan bukan pada tujuan esensial dari unjuk rasa tersebut.

Faktor eksternal penting lainnya yang dapat memengaruhi perilaku agresif mahasiswa dalam aksi unjuk rasa adalah persepsi masyarakat. Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, salah satu tujuan utama demonstrasi adalah menarik perhatian dan simpati publik terhadap suatu isu yang diperjuangkan. Dengan demikian, mahasiswa membutuhkan dukungan luas dari masyarakat agar gerakan mereka memperoleh legitimasi yang lebih besar. Di sini kita berhadapan dengan persepsi yang beragam. Di satu sisi, ada orang-orang yang memandang penggunaan kekerasan dalam aksi protes tidak dapat dibenarkan, sebuah persepsi yang mengurangi identifikasi dengan—dan akibatnya mengurangi dukungan terhadap—aksi protes tersebut (Simpson dkk., 2018). Namun di sisi lain, ada pula sebagian orang yang cenderung menormalisasi perilaku agresif selama berunjuk rasa, melihatnya sebagai komponen yang wajar—bahkan diharapkan—dari suatu ekspresi politik.

Terlepas dari banyaknya literatur mengenai protes politik dan gerakan sosial, bagaimana dampak spesifik dari pemberitaan media dan persepsi publik mengenai perilaku agresif mahasiswa dalam aksi unjuk rasa terhadap ketahanan sosial-budaya belum banyak diteliti. Maksud ketahanan sosial-budaya di sini adalah keuletan dan ketangguhan masyarakat dalam menavigasi atau pulih dari hambatan, ancaman, tantangan, dan gangguan. Masyarakat dengan ketahanan sosial-budaya yang tinggi tidak hanya bertahan dan beradaptasi, tetapi juga berkembang dalam keadaan yang dicirikan oleh perubahan dan ketidakpastian. Keck dan Sakdapolrak (2013) mengidentifikasi tiga

dimensi penting dari ketahanan sosial, yaitu kapasitas aktor sosial dalam menghadapi dan mengatasi berbagai kesulitan (*coping capacities*), kapasitas mereka untuk belajar dari pengalaman masa lalu dan menyesuaikan diri dengan tantangan baru di masa depan (*adaptive capacities*), serta kapasitas mereka dalam membangun institusi yang mendukung kesejahteraan individu dalam menghadapi krisis saat ini maupun di masa mendatang (*transformative capacities*).

Cara masyarakat merespons hambatan, ancaman, tantangan, dan gangguan—pertama dan terutama—dipengaruhi oleh bagaimana mereka mempersepsikannya (Copeland dkk., 2020). Dalam hal ini, seperti disuarakan oleh para ahli teori *agenda-setting*, tidak ada faktor yang membentuk persepsi masyarakat tentang stabilitas dan krisis sebesar media, baik media lama maupun baru (Kligler-Vilenchik, 2011). Dengan kata lain, ketahanan suatu masyarakat bergantung sebagian pada bagaimana ancaman dibingkai. Pelaporan yang sensasional tentang protes mahasiswa, misalnya, dapat melemahkan ketahanan dengan memperkuat rasa takut, mengikis kepercayaan pada aparat keamanan, dan menimbulkan perpecahan sosial (McCurdy, 2012).

Penelitian ini berupaya menyelidiki pengaruh liputan media dan persepsi masyarakat terhadap ketahanan sosial-budaya di Kota Makassar, dengan secara khusus menyoroiti demonstrasi mahasiswa. Pendekatan yang digunakan adalah metode campuran, yaitu kuantitatif (angket) dan kualitatif (wawancara dan observasi). Hasilnya, penelitian ini menemukan bahwa liputan media memiliki pengaruh yang lebih kuat dibandingkan persepsi publik terhadap ketahanan sosial-budaya. Perbedaan pengaruh ini akan dianalisis dengan menggunakan teori *agenda-setting*, yang berpendapat bahwa media membentuk bukan hanya apa yang harus dipikirkan masyarakat tetapi juga bagaimana mereka memikirkannya (McCombs, 2005). Dalam konteks ini, sebagaimana ditunjukkan hasil wawancara dan survei angket, fokus media hanya pada perilaku agresif mahasiswa selama berdemonstrasi mengalihkan perhatian publik dari isu-isu yang diperjuangkan ke kekerasan dan kerusakan. Pergeseran fokus ini dapat melemahkan ketahanan sosial-budaya karena, ketika media lebih menitikberatkan aksi-aksi destruktif

daripada tujuan protes, masyarakat mulai mengasosiasikan demonstrasi dengan kekacauan dan bukan perbaikan sosial-politik (McCurdy, 2012). Guna memperdalam konsepsi ini, bagian berikutnya akan merinci terlebih dulu desain dan metode penelitian yang digunakan, kemudian dilanjutkan diskusi mengenai temuan dan implikasinya berdasarkan teori *agenda-setting*.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode campuran kuantitatif dan kualitatif. Data dikumpulkan dengan cara penyebaran angket, wawancara, dan observasi. Angket ini bersifat tertutup, yang berarti jawaban subjek dibatasi oleh pilihan jawaban yang telah disediakan dan subjek hanya diminta untuk memilih salah satu jawaban. Adapun pilihan jawaban yang dimaksud adalah sistem penilaian persepsi dari skala *Likert* yang menyediakan lima macam pilihan jawaban: sangat sesuai (skor 5), sesuai (skor 4), cukup sesuai (skor 3), tidak sesuai (skor 2), dan sangat tidak sesuai (skor 1). Sementara itu, wawancara digunakan untuk memperoleh wawasan yang lebih mendalam mengenai objek penelitian, utamanya memperluas informasi yang belum diperoleh atau terlewat pada penggunaan metode angket. Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur, berlangsung selama kira-kira 30 menit untuk setiap partisipan dan direkam dalam bentuk audio. Partisipan terdiri dari tiga puluh orang dengan latar belakang pekerjaan yang berbeda-beda, di antaranya supir angkot (*pete-pete*), guru SMU, wiraswasta, pegawai negeri, pegawai swasta, dan ibu rumah tangga.

Di luar itu, observasi menjadi metode pelengkap guna menangkap suasana situasi sosial di lingkungan yang menjadi tempat penelitian. Data yang diperoleh berasal dari pengamatan terhadap gestur, mimik wajah, intonasi suara dan lain sebagainya, mengingat semua ini menggambarkan keadaan diri subjek yang diobservasi. Perlu digarisbawahi bahwa data observasi yang diperoleh tidak dapat dilepaskan dari momentum yang sedang terjadi selama penelitian ini dilakukan, yaitu rangkaian protes mahasiswa terhadap kebijakan kenaikan harga BBM pada tahun 2012. Saat itu, aksi unjuk rasa terjadi di banyak daerah, tidak terkecuali di Kota Makassar, dan sebagian darinya berujung kisruh (Cipto, 2012a). Ketegangan sosial ini

kemungkinan besar turut membentuk perasaan, gestur, mimik wajah, intonasi suara, dan lain sebagainya selama pengumpulan data observasi.

Tabel 1 Jenis kelamin responden

No.	Jenis Kelamin	Jumlah	Persentase
1.	Laki-laki	145	72,5%
2.	Perempuan	55	27,5%
Total		200	100%

Dalam pengumpulan sampel, teknik "*purposive sampling*" digunakan terhadap empat ratus orang dari 21 Januari 2013 sampai 21 Februari 2013. Lokasi penelitian terdiri dari tiga kecamatan dengan jumlah penduduk terbanyak di Kota Makassar, yaitu Kecamatan Tamalate, Kecamatan Biringkanaya, dan Kecamatan Rappocini. Kendati begitu, setelah angket terkumpul, terdapat 137 (seratus tiga puluh tujuh) yang tidak kembali (hilang), 20 (dua puluh) dalam kondisi rusak dan tidak memadai untuk dibaca, 43 (empat puluh tiga) tidak lengkap dalam pengisiannya, sehingga menyisakan sebanyak 200 (dua ratus) yang lengkap baik dari segi pengisiannya maupun jumlah lembarannya.

Tabel 2 Usia responden

No.	Usia	Jumlah	Persentase
1.	20 Tahun – 30 Tahun	51	25,5%
2.	31 Tahun – 40 Tahun	87	43,5%
3.	41 Tahun – 50 Tahun	62	31%
Total		200	100%

Penelitian ini menggunakan analisis regresi linier dan regresi linier berganda untuk menguji hubungan antar variabel. Regresi linier digunakan untuk menilai dampak dari satu variabel independen terhadap variabel dependen—khususnya, pengaruh liputan media massa (X1) dan persepsi masyarakat tentang perilaku agresif siswa (X2) terhadap ketahanan sosial-budaya (Y) secara individual. Sebaliknya, analisis regresi linier berganda diterapkan untuk mengevaluasi pengaruh gabungan dari variabel-variabel independen (X1 dan X2) terhadap variabel dependen (Y), sehingga dapat diketahui pengaruhnya secara bersama-sama. Di sini, liputan media massa (X1) dan persepsi publik

“Demo Mahasiswa Sudah Kelewat Batas”: Pengaruh Pemberitaan Media Dan Persepsi Publik Terhadap Ketahanan Sosial-Budaya Di Kota Makassar (Mochammad Nurdi Iriansyah)

(X2) berfungsi sebagai variabel independen, sementara ketahanan sosial budaya (Y) adalah variabel dependen.

Tabel 3 Tingkat pendidikan responden

No.	Pendidikan	Jumlah	Persentase
1.	SMU	135	67,5%
2.	Diploma	12	6%
3.	Sarjana (S1)	53	26,5%
Total		200	100%

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemberitaan Media tentang Perilaku Agresif Mahasiswa dalam Aksi Unjuk Rasa

Bagian ini menunjukkan bagaimana para responden dan partisipan menilai kecenderungan media dalam meliput peristiwa sosial dan politik seperti gerakan mahasiswa. Hasil survei angket dan wawancara mengindikasikan banyaknya yang menganggap liputan media sebagai bias, sensasional, dan tidak merefleksikan realitas. Secara khusus, responden mengidentifikasi enam masalah utama: kurangnya netralitas dalam pemberitaan, melebih-lebihkan peristiwa, distorsi realitas, sifat konten yang provokatif, penyajian informasi yang tidak lengkap, dan ketergantungan pada sumber yang tidak valid. Persepsi-persepsi ini menyoroti isu-isu yang lebih luas terkait kredibilitas media dan dampaknya terhadap wacana publik, sehingga memunculkan pertanyaan-pertanyaan kritis mengenai apakah media berperan sebagai pemberi informasi yang objektif atau justru menjadi aktor aktif dalam membentuk narasi-narasi yang menyulut informasi yang keliru dan perpecahan di dalam masyarakat.

Sebagian besar responden yang mengisi angket menyatakan bahwa pemberitaan media tidaklah netral. Sebanyak 62,5% responden menganggap isi berita dari media-media arus utama sering diarahkan untuk membentuk opini tersendiri yang melayani kepentingan tertentu. Pada saat yang sama, sebanyak 60% responden setuju bahwa media massa arus utama sering kali membesar-besarkan suatu peristiwa, sehingga berpotensi meningkatkan emosi publik dan menggiring persepsi terhadap suatu kejadian di luar tingkat keparahan yang sebenarnya.

Menurut pendapat saya, isi pemberitaan yang disampaikan oleh media massa sering kali diarahkan untuk membentuk opini tersendiri demi kepentingan kelompok tertentu.

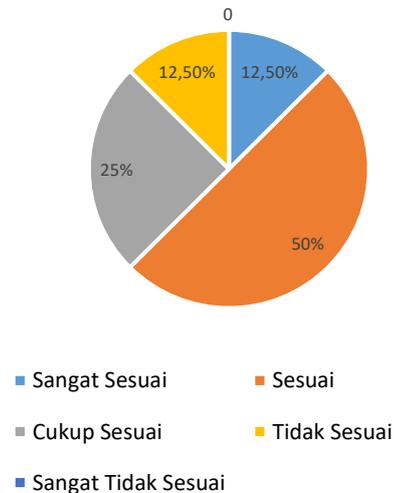


Diagram 1 Jawaban responden mengenai netralitas media

Menurut saya, masyarakat di Kota Makassar sangat baik dan cinta damai, hanya saja media massa seringkali *memblowup* peristiwa tertentu.

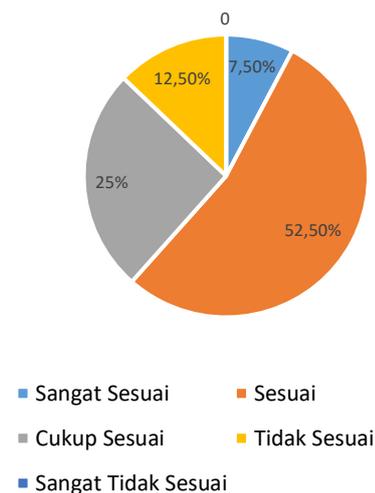


Diagram 2 Jawaban responden mengenai cara penyajian konten media

Konsepsi ini didukung dengan 67,5% responden yang menilai sebagian besar konten media berita tidak mencerminkan realitas yang sebenarnya, dan sebanyak 75% responden setuju bahwa konten media cenderung provokatif dan

sebagai hasilnya memicu reaksi emosional yang dapat mempolarisasi masyarakat.

Di atas segalanya, para partisipan mengeluhkan bagaimana pemberitaan media—khususnya mengenai gerakan mahasiswa—disajikan secara tidak lengkap atau tercecer. Mereka menilai media massa terlalu sering menyebarkan berita tanpa memverifikasi fakta atau memberikan konteks yang berurutan, sehingga mengarah pada narasi yang repetitif dan terpotong. Pendekatan seperti ini jelas lebih mengutamakan kecepatan daripada kedalaman, dengan risiko menimbulkan salah tafsir publik terhadap apa yang sebenarnya terjadi. Misalnya, saat mahasiswa berunjuk rasa menolak kenaikan harga BBM pada Maret 2012 lalu, beberapa media arus utama hanya menekankan kontroversi kebijakan pemerintah dan beban yang dirasakan oleh masyarakat. Mereka tidak mengomunikasikan sama sekali alasan resmi pemerintah menerapkan kebijakan tersebut (misalnya, upaya stabilisasi ekonomi). Narasi yang tidak berimbang seperti itu dapat menstigmatisasi pemerintah sebagai pihak yang tidak peduli terhadap kesejahteraan masyarakat, yang pada gilirannya memicu penurunan kohesi dan kepercayaan sosial.

Berita-berita yang disampaikan oleh berbagai media massa sering kali kurang menggambarkan realitas yang sebenarnya, tetapi demikian sebagian besar masyarakat lain mempercayainya.

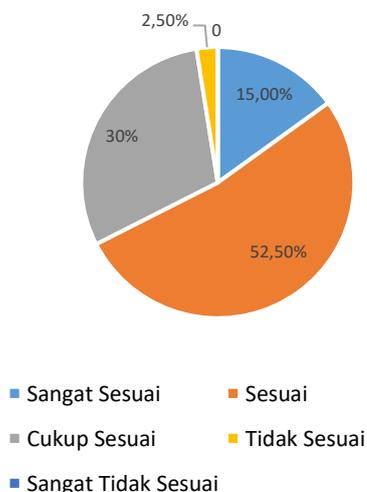


Diagram 3 Jawaban responden mengenai keandalan pemberitaan media

Para partisipan mengamati bahwa kecenderungan media untuk menyajikan isu-isu tanpa konteks yang penting dari sumber-sumber resmi secara signifikan berkontribusi pada meningkatnya ketidakpercayaan dan adopsi strategi protes yang lebih radikal. Sebagian dari mereka tampaknya menyadari bahwa pemberitaan yang selektif dan sensasional telah mendistorsi persepsi masyarakat mengenai penyebab utama demonstrasi, dan sering kali menggambarkan aksi-aksi mahasiswa secara inheren bersifat konfrontatif dan bukan berakar pada motif politik.

Pemberitaan yang disampaikan oleh berbagai media massa sebenarnya hanya untuk memenuhi harapan dari kelompok tertentu.

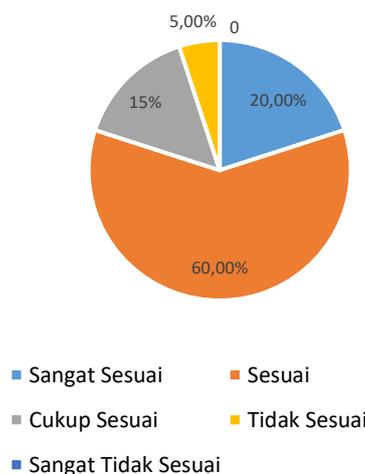


Diagram 4 Jawaban responden mengenai kepentingan di balik liputan media

Kecenderungan tersebut tidak dapat dilepaskan dari fakta bahwa berita, bagaimanapun juga, adalah produk jurnalistik dan bukan refleksi sederhana dari realitas. Proses jurnalistik ini secara intrinsik membuat peliputan apa pun terdistorsi sampai tingkat tertentu (Ruigrok dkk., 2017). Dengan kata lain, meskipun jurnalisme dipandu oleh norma-norma profesional yang kuat, khususnya independensi dan objektivitas, jurnalis tetap dipengaruhi oleh bias pribadi mereka sendiri dengan memilih dan menekankan elemen-elemen yang mereka anggap paling relevan untuk menginformasikan suatu peristiwa (Entman, 2007). Pembingkaiannya ini pada gilirannya memengaruhi bagaimana audiens menafsirkan realitas dan meningkatkan

“Demo Mahasiswa Sudah Kelewat Batas”: Pengaruh Pemberitaan Media Dan Persepsi Publik Terhadap Ketahanan Sosial-Budaya Di Kota Makassar (Mochammad Nurdi Iriansyah)

kemungkinan terjadinya bias struktural (Proust & Saldaña, 2022).

Media massa sering kali menampilkan pemberitaan yang bersifat provokatif, terutama dalam memberitakan mengenai perilaku mahasiswa dalam aksi unjuk rasa.

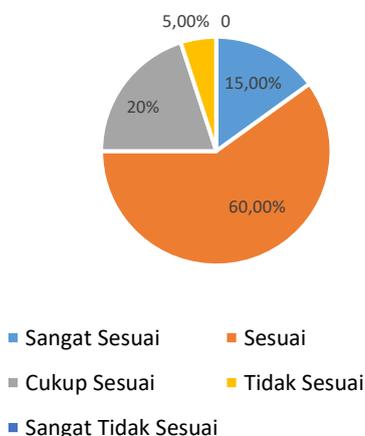


Diagram 5 Jawaban responden mengenai narasi media dalam membingkai gerakan mahasiswa

Tidak kalah pentingnya, posisi media sebagai pencari keuntungan finansial juga harus menjadi perhatian. Terlepas dari maksud mulia mereka untuk mencari dan menyebarkan informasi, media tetap membutuhkan keuntungan finansial sampai tingkat tertentu untuk bertahan hidup. Oleh karena itu, memberitakan informasi saja tidak cukup; mereka harus menghasilkan produk yang dapat dipasarkan agar tetap kompetitif di pasar informasi, salah satunya adalah dengan menyajikan apa yang diinginkan oleh audiens mereka. Dalam konteks ini, karena sifatnya yang negatif dan menyimpang, konflik dan konfrontasi mahasiswa selama berunjuk rasa relatif memiliki nilai jual yang tinggi (Van Der Meer & Hameleers, 2022). Tidak jarang perilaku agresif seperti itu dibesar-besarkan dibandingkan dengan apa yang sebenarnya terjadi (Ruigrok dkk., 2017).

Perilaku Agresif Mahasiswa dalam Aksi Unjuk Rasa

Tingginya jumlah demonstrasi mahasiswa di Kota Makassar, di satu sisi, dapat diartikan sebagai terpenuhinya peran mereka sebagai penyalur aspirasi dan kegelisahan masyarakat. Namun di sisi lain, aksi-aksi unjuk rasa yang diwarnai dengan berbagai pelanggaran

hukum dan perilaku destruktif lainnya menimbulkan pertanyaan moral tentang keseriusan mereka sebagai kaum terpelajar dalam menyampaikan kegalauan masyarakat (Jubba, 2012). Penelitian-penelitian sebelumnya telah menunjukkan bahwa dukungan masyarakat terhadap suatu gerakan sosial berkurang signifikan ketika gerakan tersebut menggunakan taktik kekerasan, dan bahwa kekerasan merusak legitimasi yang dirasakan oleh para aktivis yang terlibat dalam gerakan tersebut (Feinberg dkk., 2017; Muñoz & Anduiza, 2019; Simpson dkk., 2018). Demikianlah, meskipun kekerasan dapat meningkatkan publisitas demonstrasi, protes dengan kekerasan tidak menunjukkan perbedaan dibandingkan dengan kondisi awal ketika “tidak ada protes”. Yang terburuk, kekerasan protes dapat merusak kesan yang ingin diciptakan oleh mahasiswa dan justru berakhir ditentang oleh masyarakat yang ingin mereka bela (Thomas & Louis, 2014). Bagian ini akan menunjukkan bagaimana masyarakat di Kota Makassar mempersepsikan aksi unjuk rasa mahasiswa yang diwarnai perilaku agresif dan kontra-normatif.

Persepsi publik terhadap demonstrasi mahasiswa yang ditandai dengan perilaku agresif dan kontra-normatif di Kota Makassar cukup beragam dan kompleks. Sebanyak 64,5% responden menyatakan bahwa unjuk rasa pada banyak kesempatan memang perlu dilakukan. Namun, sebagian besar responden juga menyatakan bahwa demonstrasi tersebut sebaiknya dilakukan dengan damai tanpa mengabaikan nilai-nilai yang demokratis. Misalnya, sebanyak 81% responden menganggap perbuatan mahasiswa yang melempari batu ke arah aparat sebagai perbuatan yang sangat tidak bermoral, dan menekankan bahwa tindakan tersebut tidak mencerminkan nilai-nilai intelektual yang diharapkan dari mahasiswa. Kebanyakan anggota masyarakat tampaknya meyakini bahwa aksi unjuk rasa yang destruktif dan melanggar aturan hukum hanya akan merugikan masyarakat lebih jauh—bahkan tidak jarang memancing keributan antara mahasiswa dan warga itu sendiri yang merasa terganggu atas demonstrasi yang dilakukan. Keresahan akan perilaku agresif mahasiswa tergambar jelas dalam ungkapan partisipan A18:

“Unjuk rasa di negara kita khususnya di Makassar oleh mahasiswa menurut saya

sudah kelewat batas tidak seperti di luar negeri, mahasiswa cenderung seenaknya sementara, Polisi sebagai aparat tidak bisa banyak berbuat karena takut dicap melanggar HAM. Akibatnya mahasiswa sering bertindak semaunya sendiri dalam melakukan aksi unjuk rasa mereka.” (Wawancara, tanggal 25 Januari 2013 pukul 20.00 WITA)

Terlepas dari itu, kita tidak dapat mengabaikan bahwa setidaknya 8,5% responden membela demonstrasi sebagai hak asasi manusia yang mendasar. Perspektif ini menyoroti prinsip esensial demokrasi: pengakuan bahwa protes publik, pada dasarnya, dapat menyebabkan guncangan dan gangguan sampai tingkat tertentu. Alih-alih memandang gangguan tersebut sebagai sesuatu yang dengan sendirinya bermasalah, para responden ini menganggapnya sebagai bagian integral dari keterlibatan masyarakat dalam demokrasi yang sehat. Menurut mereka, ketidaknyamanan terhadap ketertiban umum sesekali merupakan konsekuensi yang wajar dan konsekuensi logis dari upaya menjaga kebebasan berekspresi dan hak untuk berkumpul. Sikap ini menyiratkan pandangan bahwa demokrasi bukan semata-mata tentang menjaga ketertiban, tetapi juga tentang menciptakan ruang untuk perbedaan pendapat, perdebatan, dan partisipasi aktif warga negara dalam membentuk wacana publik. Pandangan seperti ini tergambar dalam keterangan partisipan A22:

“Unjuk rasa merupakan hak asasi setiap manusia dan itu ada undang-undangnya, walaupun kemudian terjadi sejumlah kerusakan itu merupakan hal yang wajar-wajar saja di luar negeri juga begitu.” (Wawancara, tanggal 25 Januari 2013 pukul 17.00 WITA)

Bagaimanapun, temuan penting itu sebaiknya tidak dilebih-lebihkan mengingat pendapat kontras seperti itu relatif minoritas. Sebaliknya, Meskipun itu temuan penting, kita sebaiknya tidak melebih-lebihkannya mengingat jawaban kontras seperti itu relatif minoritas. Sebaliknya, ada lebih banyak responden yang mengaku balik badan atas demonstrasi yang dilakukan mahasiswa karena terdapat kekerasan

dan kerusuhan di dalamnya. Hampir 40 persen responden menyatakan tidak mendukung aksi unjuk rasa mahasiswa yang diwarnai perilaku agresif, sementara 48% di antaranya lebih memilih netral karena mungkin memerlukan detail lebih lanjut tentang apa yang dimaksud dengan “perilaku agresif” tersebut. Kendati begitu, tidak ada keraguan bahwa sebagian besar responden dapat membalikkan dukungannya terhadap mahasiswa jika demonstrasi yang dilakukan menimbulkan ketidaknyamanan dan bahkan permusuhan di antara anggota masyarakat sendiri. Hal ini ironis karena demonstrasi mahasiswa pada dasarnya dilakukan untuk menyampaikan aspirasi masyarakat, sementara kebanyakan anggota masyarakat itu sendiri tidak mendukung gerakan tersebut—bukan karena tujuannya tetapi karena caranya yang tidak bijaksana. Kekecewaan ini tergambar dalam keterangan partisipan A2:

“Mahasiswa kalau mau berdemo silakan-silakan saja, tetapi tidak usah menutup jalan. Memangnya ini jalan kepunyaan mereka? Dan lagi mahasiswa sekarang itu payah sekali, polisi dan tentara yang berjaga-jaga mereka lempari batu dan benda-benda lainnya. Apa sih mau mereka itu? Wajar saja kalau polisi dan tentara itu marah hingga mengejar-ngejar mereka (mahasiswa).” (Wawancara, tanggal 25 Januari 2013 pukul 09.00 WITA)

Beberapa partisipan membandingkan demonstrasi mahasiswa hari ini dengan mahasiswa pada generasinya. Berikut adalah cerita partisipan A24:

“Mahasiswa sekarang berbeda dengan zaman sewaktu saya masih berstatus mahasiswa (tahun 70-an). Waktu zaman saya kalau berunjuk rasa memang juga membakar ban tetapi tidak ada yang namanya penjarahan, menutup jalan dan sebagainya. Kalau ada pete-pete (angkot) melintas di jalan tempat kami berunjuk rasa, ya kami persilakan tetapi unjuk rasa jalan terus. Kalau sekarang semua macet karena jalan ditutup oleh mahasiswa.” (Wawancara, tanggal 27 Januari 2013 pukul 17.00 WITA)

“Demo Mahasiswa Sudah Kelewat Batas”: Pengaruh Pemberitaan Media Dan Persepsi Publik Terhadap Ketahanan Sosial-Budaya Di Kota Makassar (Mochammad Nurdi Iriansyah)

Temuan signifikan lainnya adalah bahwa perilaku agresif dan kontra-normatif mahasiswa selama berdemonstrasi menciptakan citra negatif bagi mahasiswa secara keseluruhan. Meskipun kenyataannya demonstrasi mahasiswa di Kota Makassar tidak selalu diiringi dengan kekerasan, bahkan sebagian besar darinya cenderung dilakukan secara damai dan demokratis, beberapa peristiwa yang melibatkan kekerasan itulah yang justru paling diingat oleh masyarakat. Akibatnya, mahasiswa entah bagaimana senantiasa diasosiasikan dengan kekerasan, bahkan di luar aksi unjuk rasa. Citra negatif seperti ini sangat berbahaya bagi gerakan sosial mahasiswa di masa depan karena membuat publik tidak lagi percaya pada tujuan-tujuan mulia apa pun yang diklaim oleh mahasiswa, seperti melawan ketidakadilan sosial dan memberantas korupsi. Keterangan partisipan A17 menggambarkan paradigma tersebut dengan jelas:

“Menurut saya peristiwa unjuk rasa di Kota Makassar ini sudah terlalu sering terjadi, setiap peristiwa (isu) sepertinya selalu dijadikan alasan oleh mahasiswa untuk berunjuk rasa. Dan saat berunjuk rasa bisa dipastikan mereka pasti menutup jalan, sehingga menimbulkan kemacetan total. Sudah tentu saya dan juga mungkin orang yang lain tidak dapat menuju ke kantor tepat waktu bahkan mungkin harus kembali pulang karena unjuk rasa mereka sering sampai sore hari. Ujung-ujungnya keesokan hari di kantor saya mendapat teguran dari bos. Saya betul-betul kecewa dengan sikap mahasiswa tersebut. Banyak merugikannya daripada menguntungkan masyarakat.”
(Wawancara tanggal 24 Januari 2013, pukul 12.00 WITA)

Pengaruh Pemberitaan Media dan Persepsi Masyarakat tentang Perilaku Agresif Mahasiswa dalam Aksi Unjuk Rasa terhadap Ketahanan Sosial-Budaya Kota Makassar

Suatu masyarakat dikatakan memiliki ketahanan sosial-budaya yang tinggi apabila mereka mampu merespons setiap perubahan dan tekanan yang muncul. Dalam prosesnya, mereka

dapat mentoleransi, menyerap, menghadapi, dan menyesuaikan diri terhadap berbagai ancaman dan tantangan. Ancaman ini biasanya diasumsikan hanya berasal dari luar unit sosial (misalnya, dampak kenaikan harga terhadap pengeluaran rumah tangga), tetapi sebenarnya dapat muncul juga dari dinamika internal (misalnya, dampak konflik sesama warga terhadap kerukunan sosial), atau dari interaksi antara keduanya (Keck & Sakdapolrak, 2013). Bagian ini menguraikan pengaruh dinamika eksternal (pemberitaan media massa) dan dinamika internal (persepsi masyarakat) mengenai demonstrasi mahasiswa yang agresif terhadap ketahanan sosial-budaya masyarakat di Kota Makassar. Hasil analisis regresi linier menunjukkan bahwa liputan media menyumbang 33,8% dari variasi ketahanan sosial-budaya, sedangkan persepsi publik hanya menyumbang 2,1%. Namun, ketika dianalisis secara bersama-sama melalui regresi linier berganda, pengaruh gabungan keduanya meningkat sedikit menjadi 37,2% dengan liputan media sebagai faktor dominan.

Mengapa pengaruh pemberitaan media massa lebih besar daripada persepsi masyarakat? Berdasarkan teori *agenda-setting*, ada beberapa penjelasan yang masuk akal. Pertama-tama, keterjangkauan informasi yang disampaikan oleh media sangat luas karena “keberadaannya di mana-mana” (Bagheri & Keykha, 2016). Tidak seperti sekolah, misalnya, media dapat membentuk kelas tanpa dinding dengan jutaan pendengar. Hal ini menjelaskan mengapa media massa memiliki kekuatan besar dalam menjadikan suatu isu sebagai agenda atau perhatian publik. Sebagaimana dicatat oleh Ragas (2013), ketika suatu isu dibingkai atau disebarluaskan oleh media massa, publik langsung menganggap isu tersebut sebagai penting dan layak diperhatikan. Lebih jauhnya, media tidak hanya mengarahkan perhatian publik tentang apa isu terpenting hari ini, tetapi juga membentuk persepsi masyarakat mengenai aspek spesifik dari isu tersebut (McCombs & Guo, 2014). Dengan kata lain, selain mendikte apa yang dipikirkan masyarakat, media massa juga membentuk bagaimana mereka memikirkan dan memahaminya.

Konsepsi tersebut berlaku dalam hal pemberitaan demonstrasi mahasiswa. Ketika liputan media massa dipenuhi oleh aksi unjuk rasa mahasiswa, meskipun terkadang konten

yang diberitakan dalam beberapa artikel masih merujuk pada satu peristiwa yang sama, terdapat kemungkinan bahwa masyarakat menilai demonstrasi mahasiswa terjadi terlalu sering. Tidak kalah pentingnya, pemberitaan media juga memainkan peran penting dalam bagaimana masyarakat mempersepsikan pesan protes, tergantung pada cara pesan tersebut disajikan dan aspek-aspek apa yang ditonjolkan (Proust & Saldaña, 2022). Misalnya, manakala protes mahasiswa diliput dengan penekanan pada bentrokan kekerasan daripada keluhan yang mendasarinya, pembingkaiannya ini memengaruhi apakah publik memandang demonstrasi sebagai ekspresi sah dari perbedaan pendapat dan penyampaian aspirasi atau sebagai ancaman terhadap stabilitas masyarakat.

menyatakan bahwa media massa sering kali hanya menyoroti keburukan objek yang diberitakannya, dan 85% responden menganggap kecenderungan seperti itu terus diulang-ulang sehingga berpotensi menciptakan atau memperdalam ketidakpercayaan dan sinisme terhadap objek yang diberitakan. Konsepsi ini terutama benar saat media secara detail menggambarkan bagaimana aparat keamanan, misalnya, melempar gas air mata dan/atau menyemprotkan *water cannon* kepada kerumunan mahasiswa tanpa memberikan konteks yang lengkap. Narasi seperti ini dapat menurunkan kepercayaan publik terhadap lembaga-lembaga, termasuk pemerintah, penegak hukum, dan institusi-institusi sosial-politik lainnya.

Media massa hanya memberitakan hal-hal yang negatif terhadap objek yang sedang diberitakannya.

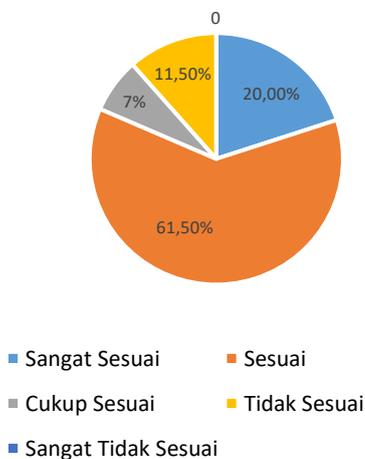


Diagram 6 Jawaban responden mengenai proporsi dari konten media massa

Besarnya pengaruh pemberitaan media terhadap ketahanan sosial-budaya dapat merujuk pada efek positif atau negatif. Namun dalam konteks penelitian ini, liputan tentang perilaku agresif mahasiswa selama berunjuk rasa—terutama ketika diberitakan dengan frekuensi tinggi dan secara tidak proporsional lebih menyoroti perilaku agresifnya alih-alih tujuan inti yang melatarbelakanginya—berisiko melemahkan ketahanan sosial-budaya masyarakat di Kota Makassar. Hal ini dapat diamati lewat beberapa indikator yang muncul dari data. *Pertama*, kepercayaan pada aparat keamanan dan institusi sosial-politik yang ada menurun. Sebanyak 81,5% responden

Menurut saya, pengulangan berita-berita tertentu mempunyai tujuan meningkatkan rating dan menguatkan opini masyarakat terhadap berita yang diulanginya tersebut.

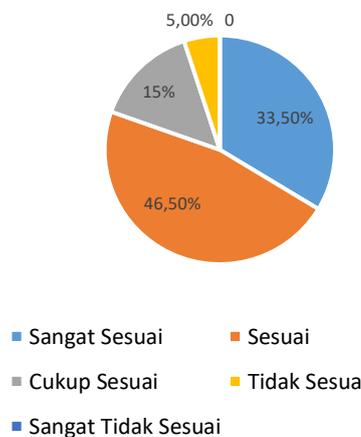


Diagram 7 Jawaban responden mengenai tujuan pengulangan berita tertentu

Kedua, citra negatif terhadap mahasiswa yang dibentuk atau diperkuat oleh pemberitaan media dapat menimbulkan perpecahan sosial antara “kita versus mereka”. Proust dan Saldaña (2022) menemukan bahwa kerusuhan dan konfrontasi merupakan aspek yang paling banyak ditekankan dalam liputan protes, di mana kedua bingkai tersebut mengarahkan audiens untuk bertanya siapa yang harus mengemban tanggung jawab. Dengan kata lain, ketika meliput sebuah demonstrasi, media berita tidak hanya menekankan tindakan kekerasan tetapi juga menginformasikan siapa yang dianggap bertanggung jawab atas tindakan kekerasan tersebut. Dalam konteks pemberitaan kerusuhan

“Demo Mahasiswa Sudah Kelewat Batas”: Pengaruh Pemberitaan Media Dan Persepsi Publik Terhadap Ketahanan Sosial-Budaya Di Kota Makassar (Mochammad Nurdi Iriansyah)

saat unjuk rasa mahasiswa, tanggung jawab biasanya diatribusikan kepada mahasiswa itu sendiri selaku inisiator aksi. Terlepas dari benar-tidaknya, entah diungkapkan secara eksplisit maupun implisit, narasi seperti itu berisiko menciptakan atau memperdalam citra negatif mahasiswa. Citra negatif ini tercermin dalam keyakinan beberapa partisipan yang entah bagaimana mengasosiasikan mahasiswa dengan kekerasan, bahkan di luar konteks demonstrasi. Hal ini dapat merusak salah satu elemen kunci dari ketahanan sosial-budaya, yaitu kohesi sosial, dengan memicu pemikiran biner antara pendukung dan penentang gerakan mahasiswa. Seolah di dalam masyarakat terdapat kubu “suci” dan kubu “kotor”—dan setiap kubu berebut klaim sebagai kubu “suci”.

Ketiga, frekuensi tinggi pemberitaan media mengenai kerusakan gerakan mahasiswa dapat menormalisasi penggunaan kekerasan dalam gerakan-gerakan sosial di masa mendatang. Sebagaimana telah disinggung sebelumnya, media cenderung menekankan sisi buruk dari isu atau peristiwa yang diberitakannya karena pada dasarnya sasaran pasar mereka—yaitu, masyarakat secara keseluruhan—memiliki bias negativitas, sebuah kecenderungan untuk lebih menitikberatkan aspek negatif dari sesuatu dibandingkan aspek positifnya. Masalah terbesarnya adalah bahwa, ketika liputan mengenai gerakan mahasiswa menyoroti aspek negatifnya (seperti kisruh dengan sesama mahasiswa atau pihak eksternal) secara tidak proporsional, hal itu berisiko menormalisasi aspek negatif serupa di masa depan (Haveripeth, 2013). Seolah jika selama ini gerakan mahasiswa diberitakan “selalu” melibatkan kekerasan dalam berbagai bentuk, maka gerakan mahasiswa—atau gerakan sosial secara umum—yang melibatkan kekerasan dianggap bukan lagi pelanggaran hukum. Sebaliknya, hal itu berisiko dipandang sebagai sesuatu yang normal dan wajar, atau bahkan diidentikkan dengan aksi heroisme (Jubba, 2012). Normalisasi seperti ini jelas menciptakan preseden buruk bagi gerakan-gerakan sosial lainnya di masa mendatang.

Keempat, selain menormalisasi kekerasan, frekuensi tinggi pemberitaan tentang perilaku kontra-normatif mahasiswa selama berunjuk rasa juga dapat memicu kepanikan massa. Benar bahwa mahasiswa membutuhkan publikasi media untuk mendapatkan perhatian

masyarakat dan menguatkan keluhan mereka di mata pemerintah. Tidak ada publikasi media akan menciptakan kesan tidak terjadi apa-apa. Salah satu cara menarik perhatian media adalah dengan menciptakan kejadian-kejadian sensasional dan dramatis, misalnya membakar ban di tengah jalan, retorika yang menghasut, pemblokiran lalu lintas, dan seterusnya. Bahkan tidak jarang aksi-aksi seperti itu ditunda sampai wartawan atau jurnalis datang dan siap mencatat semua yang terjadi (Marijan & Fitrianto, 2013). Masalahnya, narasi pemberitaan yang menitikberatkan perilaku-perilaku kontra-normatif seperti itu dapat menciptakan kepanikan massa, di mana masyarakat memandang demonstrasi sebagai sesuatu yang berbahaya dan bukan sebagai bagian dari perjuangan sosial-politik yang lebih luas (Feinberg dkk., 2017). Akibatnya, kepercayaan terhadap gerakan mahasiswa dapat terkikis, dan dukungan publik terhadap perjuangan mereka berkurang. Para aktivis mahasiswa tampaknya harus mengelola tugas yang sulit untuk meningkatkan kesadaran akan tujuan mereka dan tetap dapat diterima oleh publik yang hanya berperan sebagai pengamat (Thomas & Louis, 2014).

Sementara pengaruh pemberitaan media terhadap ketahanan sosial-budaya cukup besar, pengaruh persepsi publik relatif kecil. Hal ini terutama disebabkan oleh sifat subjektif dari persepsi publik, yang dibentuk oleh pengalaman individu, latar belakang sosial-ekonomi, pendidikan, karakteristik kepribadian, dan kondisi emosional (Peter, 2021). Hasil survei dari penelitian ini menunjukkan perbedaan yang signifikan dalam persepsi publik mengenai demonstrasi mahasiswa berdasarkan usia dan latar belakang pendidikan. Di antara responden berusia 20 hingga 30 tahun, 33,33% setuju dengan pernyataan bahwa “demonstrasi tidak lagi diperlukan oleh mahasiswa”, sementara 12,5% tidak setuju. Sebaliknya, 62,06% responden berusia 31 hingga 40 tahun mendukung pandangan tersebut tanpa ada responden yang menyatakan tidak setuju. Variasi serupa muncul ketika membandingkan individu dengan pendidikan setingkat sekolah menengah atas dan universitas terkait keyakinan bahwa demonstrasi harus dihindari karena efeknya yang mengganggu. Keragaman sudut pandang ini menghasilkan pengaruh yang berbeda-beda—dan karenanya relatif kecil

secara keseluruhan—terhadap ketahanan sosial-budaya. Sebagai perbandingan, liputan media massa memberikan pengaruh yang lebih seragam, sebagian besar karena jangkauannya yang luas dan pesan yang konsisten.

SIMPULAN

Penelitian ini mempelajari pengaruh liputan media dan persepsi publik tentang perilaku agresif mahasiswa selama demonstrasi terhadap ketahanan sosial-budaya di Kota Makassar. Temuan menunjukkan bahwa pemberitaan media massa memiliki dampak yang jauh lebih besar terhadap ketahanan sosial-budaya dibandingkan dengan persepsi masyarakat mengenai demonstrasi anarkis mahasiswa. Hasil analisis regresi linier menunjukkan bahwa liputan media mengenai kekerasan demonstrasi mahasiswa secara signifikan menjelaskan 33,8% dari variasi ketahanan sosial-budaya, sedangkan persepsi publik memiliki dampak kecil sebesar 2,1%. Ketika digabungkan dalam model regresi berganda, kedua faktor tersebut secara bersama-sama menjelaskan 37,2% dari variasi yang ada, dengan peran dominan liputan media.

Pengaruh yang lebih kuat dari liputan media dapat dijelaskan melalui teori *agenda-setting*, yang menyatakan bahwa media tidak hanya mendikte isu-isu apa yang dianggap penting oleh masyarakat, tetapi juga membentuk bagaimana mereka menginterpretasikan isu-isu tersebut. Kehadiran media yang ada di mana-mana memastikan bahwa pesan-pesannya menjangkau khalayak luas, dan sebagai hasilnya berulang kali memperkuat narasi tertentu. Dalam konteks demonstrasi mahasiswa, laporan media dengan frekuensi tinggi—seringnya berfokus secara tidak proporsional pada perilaku agresif—dapat menciptakan persepsi bahwa protes semacam itu lebih lazim dan penuh kekerasan daripada kenyataannya.

Studi ini menyoroti beberapa dampak buruk dari pembingkai selektif seperti itu terhadap ketahanan sosial-budaya di Kota Makassar. Pertama, hal tersebut dapat mengikis kepercayaan terhadap aparat keamanan dan institusi sosial-politik, karena paparan berulang-ulang terhadap citra kekerasan dapat menumbuhkan sinisme dan ketakutan. Kedua, penggambaran mahasiswa sebagai aktor pengganggu memperkuat perpecahan sosial,

menumbuhkan mentalitas “kita versus mereka”. Ketiga, normalisasi taktik protes yang agresif melalui eksposur media yang terus-menerus dapat melegitimasi penggunaan kekerasan dalam gerakan-gerakan di masa depan. Terakhir, sensasionalisme seputar perilaku kontra-normatif dapat memicu kepanikan massa, memperkuat ketegangan sosial alih-alih mendorong dialog yang konstruktif.

DAFTAR PUSTAKA

- Bagheri, A., & Keykha, M. R. (2016). The Effect of Mass Media on Decreasing the Amount of Delinquency in Children and Juveniles (Case Study: Detention centers of Sistan and Baluchestan Province). *Journal of Law and Justice Studies*, 1(2), 44–48.
- Cipto, H. (2012a, Maret 20). *Demo Tolak Kenaikan Harga BBM di Makassar*. Kompas.com. <https://nasional.kompas.com/read/2012/03/20/12013757/~Regional~Indonesia Timur>
- Cipto, H. (2012b, Maret 21). *Demo di Makassar Rusuh, 1 Mobil Dibakar*. Kompas.com. <https://olahraga.kompas.com/read/2012/03/21/15442287/~Regional~Indonesia Timur>
- Cipto, H., & Rusiana, D. A. (2022, September 5). *Demo Tolak Kenaikan Harga BBM di Makassar Berakhir Bentrok, Mahasiswa dan Warga Saling Lempar Batu*. Kompas.com. <https://makassar.kompas.com/read/2022/09/05/205833578/demo-tolak-kenaikan-harga-bbm-di-makassar-berakhir-bentrok-mahasiswa-dan>
- Copeland, S., Comes, T., Bach, S., Nagenborg, M., Schulte, Y., & Doorn, N. (2020). Measuring social resilience: Trade-offs, challenges and opportunities for indicator models in transforming societies. *International Journal of Disaster Risk Reduction*, 51, 101799. <https://doi.org/10.1016/j.ijdr.2020.101799>
- Entman, R. M. (2007). Framing Bias: Media in the Distribution of Power. *Journal of Communication*, 57(1), 163–173. <https://doi.org/10.1111/j.1460-2466.2006.00336.x>

“Demo Mahasiswa Sudah Kelewat Batas”: Pengaruh Pemberitaan Media Dan Persepsi Publik Terhadap Ketahanan Sosial-Budaya Di Kota Makassar (Mochammad Nurdi Iriansyah)

- Feinberg, M., Willer, R., & Kovacheff, C. (2017). *Extreme Protest Tactics Reduce Popular Support for Social Movements* (SSRN Scholarly Paper 2911177). Social Science Research Network. <https://doi.org/10.2139/ssrn.2911177>
- Haveripeth, P. D. (2013). Contributing Factors of Juvenile Delinquency. *International Journal of Innovative Research & Development*, 2(1), 8–16.
- Jubba, H. (2012). Anarkisme Demonstrasi Mahasiswa: Studi Kasus Pada Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. *Jurnal Studi Pemerintahan*, 3(1), 49–70. <https://doi.org/10.18196/jgp.2012.0004>
- Keck, M., & Sakdapolrak, P. (2013). What Is Social Resilience? Lessons Learned and Ways Forward. *Erdkunde*, 67(1), 5–19.
- Kligler-Vilenchik, N. (2011). Memory-Setting: Applying Agenda-Setting Theory to the Study of Collective Memory. Dalam M. Neiger, O. Meyers, & E. Zandberg (Ed.), *On Media Memory* (hlm. 226–237). Palgrave Macmillan UK. https://doi.org/10.1057/9780230307070_17
- Marijan, K., & Fitrianto, H. (2013). Anatomi Kekerasan Mahasiswa di Makassar. *JRP (Jurnal Review Politik)*, 3(1), Article 1. <https://doi.org/10.15642/jrp.2013.3.1.1-27>
- McCombs, M. (2005). A Look at Agenda-setting: Past, present and future. *Journalism Studies*, 6(4), 543–557. <https://doi.org/10.1080/14616700500250438>
- McCombs, M. E., & Guo, L. (2014). Agenda-Setting Influence of the Media in the Public Sphere. Dalam R. S. Fortner & P. M. Fackler (Ed.), *The Handbook of Media and Mass Communication Theory* (1 ed., hlm. 249–268). Wiley. <https://doi.org/10.1002/9781118591178.ch14>
- McCurdy, P. (2012). Social Movements, Protest and Mainstream Media. *Sociology Compass*, 6(3), 244–255. <https://doi.org/10.1111/j.1751-9020.2011.00448.x>
- Muñoz, J., & Anduiza, E. (2019). ‘If a fight starts, watch the crowd’: The effect of violence on popular support for social movements. *Journal of Peace Research*, 56(4), 485–498. <https://doi.org/10.1177/0022343318820575>
- Peter, C. (2021). The Will of the People? Effects of Politicians’ Subjective Claims about Public Opinion on Perceived Public Opinion and Evaluative Judgments. *Mass Communication and Society*, 24(3), 345–371. <https://doi.org/10.1080/15205436.2020.1850797>
- Proust, V., & Saldaña, M. (2022). Another Violent Protest? New Perspectives to Understand Protest Coverage. *Media and Communication*, 10(4), 18–29. <https://doi.org/10.17645/mac.v10i4.5796>
- Ragas, M. W. (2013). Agenda-Building and Agenda-Setting Theory: Which Companies We Think About and How We Think About Them. Dalam C. E. Carroll (Ed.), *The Handbook of Communication and Corporate Reputation* (1 ed., hlm. 151–165). Wiley. <https://doi.org/10.1002/9781118335529.ch15>
- Ruigrok, N., Van Atteveldt, W., Gagestein, S., & Jacobi, C. (2017). Media and juvenile delinquency: A study into the relationship between journalists, politics, and public. *Journalism*, 18(7), 907–925. <https://doi.org/10.1177/1464884916636143>
- Simpson, B., Willer, R., & Feinberg, M. (2018). Does Violent Protest Backfire? Testing a Theory of Public Reactions to Activist Violence. *Socius: Sociological Research for a Dynamic World*, 4, 2378023118803189. <https://doi.org/10.1177/2378023118803189>
- Thomas, E. F., & Louis, W. R. (2014). When Will Collective Action Be Effective? Violent and Non-Violent Protests Differentially Influence Perceptions of Legitimacy and Efficacy Among Sympathizers. *Personality and Social Psychology Bulletin*, 40(2), 263–276. <https://doi.org/10.1177/0146167213510525>

- Van Der Meer, T. G. L. A., & Hameleers, M. (2022). I Knew It, the World is Falling Apart! Combatting a Confirmatory Negativity Bias in Audiences' News Selection Through News Media Literacy Interventions. *Digital Journalism*, 10(3), 473–492. <https://doi.org/10.1080/21670811.2021.2019074>
- Wahyudi, I. (2024, Desember 10). *Terbanyak di Indonesia, Mahasiswa Makassar Unjuk Rasa 800 Kali Dalam Setahun*. Tribuntoraja.com. <https://toraja.tribunnews.com/2024/12/10/terbanyak-di-indonesia-mahasiswa-makassar-unjuk-rasa-800-kali-dalam-setahun>
- Widiansyah, S., & Hamsah, H. (2018). Dampak Perubahan Global terhadap Nilai-nilai Budaya Lokal dan Nasional. *Hermeneutika: Jurnal Hermeneutika*, 4(1), 39–48. <https://doi.org/10.30870/hermeneutika.v4i1.4822>
- Young, I. M. (2001). Activist Challenges to Deliberative Democracy. *Political Theory*, 29(5), 670–690.